

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung sering disebut sebagai “Jawa Utara” karena letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa, dan secara geografis hanya dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu Selat Sunda. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Lampung merupakan wilayah Karesidenan Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya adalah Palembang. Berdasarkan aspek legalitas hukum (*de Jure*) Provinsi Lampung¹ didirikan pada 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 3 Tahun 1964 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964.²

Secara administratif, sebelah Utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Banten, dan sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia.³ Menurut Badan Pusat Statistik (2014), jumlah penduduk Lampung pada 2014 adalah 8.026.191 jiwa.⁴ Dari hasil sensus tersebut, suku Jawa merupakan entitas terbesar dengan persentase sebesar 61,02%, sedangkan suku Lampung hanya berkisar 11,9%, jumlah ini masih lebih kecil dari etnis Sunda 13,29%, dan sisanya adalah suku minoritas seperti Banten 3,68%, Palembang 2,89%, Bali 1,62%, serta

¹ Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 km², dengan luas daratan 35.376,5 km² dan luas perairan pesisir sekitar 16.625,3 km². Panjang garis pantainya kurang lebih 1.105 km yang terdiri dari 69 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Tabuan. Selain itu, terdapat dua teluk besar di Lampung, yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka. Dalam Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, *Aji Bandar Lampung* (2012): 10-11.

² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Catatan Pembuka: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. 10.

³ *Ibid.*

⁴ Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten atau Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin 2014; dari <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2014.html>; diakses pada 4 Agustus 2018.

etnis lainnya 3,48%.⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah dengan keragaman suku dan budaya yang tinggi.

Heterogenitas budaya, suku dan agama di Provinsi Lampung tersebut merupakan produk dari kebijakan transmigrasi yang dimulai dari masa kolonialisasi (1905-1942),⁶ pra-Pelita (1950-1969), Pelita I-IV/Masa Orde Baru (1969/1970-1998/1999), dan pasca Orde Baru (1999/2000-2009).⁷ Lebih dari satu abad arus transmigrasi telah dilakukan oleh pemerintah saat itu, transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali datang dan bertempat tinggal di daerah Lampung.⁸ Selain transmigran dari beberapa daerah di atas, terdapat beberapa transmigran dari daerah Banten dan pulau Sumatera yang juga ikut bertransmigrasi ke daerah Lampung.

Di kabupaten Lampung Selatan,⁹ beragam suku yang mendiami daerah tersebut hidup damai berdampingan dengan dua suku besar, yaitu suku Saibatin dan Pepadun. Berdasarkan data yang ada, transmigran dari Bali menjalani kehidupannya di desa Balinuraga (Lampung Selatan) dan

⁵ Sudrajat, Djadhat. Catatan Penutup: Lampung, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung, 2012, hlm. 185.

⁶ Transmigrasi pada periode ini dilatarbelakangi oleh gagasan "Politik Balas Budi" Van Deventer, ditulis dalam bukunya, "Een Eere Schuld", yang bertujuan untuk mengurai rantai kemiskinan di Pulau Jawa akibat kerja paksa dan *culture stelsel*. Transmigrasi pada masa Kolonialisasi tersebut, ditandai dengan perpindahan penduduk ke dari Pulau Jawa ke beberapa wilayah di antaranya Lampung (1905-1942). "Pada gelombang pertama sebanyak 155 keluarga dari Bagelen, Karesidenan Kedu, Jawa Tengah ditempatkan ke daerah Gedong Tataan Lampung yang saat ini merupakan ibukota Kabupaten Pesawaran. Program kolonisasi yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda ke Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 KK dengan 25.25.718 jiwa), Jawa Timur (19.567 KK dengan 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain (eks buruh kontrak dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 87.367 jiwa." Lihat buku Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. tahun 2015, hlm. 4.

⁷ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 2009. Buku Data Ketransmigrasian, hal 2-7.

⁸ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret 2014, hlm. 13.

⁹ Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibukotanya adalah Kalianda. Lampung Selatan terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 248 desa dan 3 kelurahan. Dalam Khubban, Abdan, "Judicial Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung", *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, Vol. 2 (4), 2014, hlm. 126-131.

diperkirakan mulai datang ke daerah Lampung Selatan pada tahun 1958 bersamaan para transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Para transmigran tersebut oleh Pemerintah pusat ditempatkan di Seputih Banyak, Way Seputih 1, Palas, dan Sidomulyo.¹⁰ Secara khusus, Sidomulyo merupakan kecamatan di kabupaten Lampung Selatan, lebih tepatnya Desa Balinuraga, disiapkan untuk menampung para transmigran dari Bali.

Berdasarkan hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK - The Habibie Center, 2014) bahwa program transmigrasi pemerintah telah memperoleh persetujuan dari komunitas adat yang mendiami lahan di daerah tujuan transmigrasi (hasil wawancara SNPK terhadap tokoh adat Lampung Selatan, 7 Februari 2014).¹¹ Selain itu, banyak juga tokoh adat Lampung Selatan yang menyatakan bahwa penduduk lokal dan komunitas adat di Lampung Selatan menyambut hangat kedatangan para migran di daerah mereka.

Sejarah masuknya orang Bali ke Lampung Selatan tidak akan pernah lepas dari semangat seorang tokoh adat Lampung, Intan Mas Jahidin, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda (sekarang bupati) periode 1957-1968, untuk mempraktikkan nilai-nilai moral suku Lampung, *Nemui Nyimah* yaitu terbuka dan menerima tamu dengan baik.¹² Dikutip dari catatan Pengantar Budisantoso, dalam buku, "Merajut Jurnalisme Damai di Lampung", bahwa Intan Mas yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda sekaligus sebagai *penyimbang* adat kedatangan lima orang warga Bali ke rumahnya. Kelima orang tersebut menceritakan bahwa rumahnya telah hancur akibat terkena dampak letusan Gunung Agung tahun 1963 silam. Mereka menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kehidupannya di tanah Lampung. Tidak sekedar memberikan tempat menumpang, namun Intan Mas juga

¹⁰ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

¹² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Pengantar Penyunting: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. xv-xvii.

menjanjikan akan memberikan tanah seluas dua hektare bagi setiap kepala keluarga. Setidaknya seluas 15.000 hektare tanah telah dihibahkan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga dari Bali yang memutuskan untuk hidup di Lampung saat itu.¹³

Masyarakat bali yang ada di Balinuraga sebagian besar berasal dari Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang lebih dikenal dengan sebutan Bali Nusa karena letaknya di sebelah Timur Pulau Bali. Pulau Nusa Penida merupakan daerah gersang, dan secara geografis letaknya “terasingkan”. Dilihat dari aspek sosio-historisnya, warga Pulau Nusa Penida digolongkan sebagai *Jabawangsa*,¹⁴ sebutan lain dari *Sudrawangsa* atau orang *Sudra*.¹⁵

Jika diperhatikan secara saksama, struktur dan dimensi kehidupan sosial yang terbangun di Provinsi Lampung cenderung berbentuk *enklaf-enklaf* kesukuan. Terbukti dengan adanya perkampungan Lampung, perkampungan Bali, Sunda dan suku lainnya. Hal inilah yang dikemudian hari menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya konflik identitas antar kelompok di Lampung Selatan.

Lampung dikenal dengan julukannya sebagai, “Indonesia Mini”, karena dengan komposisi masyarakatnya yang heterogen, mulai dari suku Lampung, Bali, Jawa, Sunda, Padang, Semendo, Komerling, Batak, Bugis, Tionghoa, Madura dan suku lainnya, mereka tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis.¹⁶ Namun julukan tersebut kemudian dipertanyakan kembali setelah munculnya konflik kekerasan pada tanggal 28-29 Oktober 2012, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sebutan *Jabawangsa* disematkan pada warga Pulau Nusa Penida, karena pada awalnya pulau tersebut merupakan tempat pembuangan para tahanan politik pihak kerajaan, pelaku praktek ilmu hitam dan kejahatan di lingkungan masyarakat ketika berada di pulau induk Bali. Status dan kedudukan orang yang mengalami pengasingan ke Pulau Nusa Penida akan secara otomatis lenyap dan menjadi orang *jaba*, yaitu orang luar. Lihat Setiawan, Wahyu, “*Pasraman* sebagai Media Pembentuk identitas Pasca Konflik”, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 4 (1), 2015, hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 11.

Keperihatinan terhadap tragedi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun belum cukup kuat dalam menopang dan mengukuhkan integrasi sosial sebagai bangsa yang plural tetapi tetap satu, *Bhineka Tunggal Ika*.

Fakta bahwa masih rapuhnya fondasi struktur kehidupan sosial di Provinsi Lampung, dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga terkemuka, yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan The Habibie Center, berturut-turut mengungkapkan fakta bahwa *pertama*, LSI dan Yayasan Denny JA merilis hasil risetnya tentang lima wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk paska reformasi, yaitu 1) Maluku, Konflik Muslim-Kristen; 2) konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat; 3) kekerasan terhadap etnis Tionghoa tahun 1998, di Jakarta; 4) kekerasan terhadap kelompok penganut aliran Ahmadiyah di Mataram, yang dampaknya menjadikan kelompok Ahmadiyah sebagai pengungsi sejak tahun 2005; dan terakhir 5) kekerasan atau konflik multietnik yang melibatkan kelompok pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.¹⁷

LSI mengkonfirmasi data bahwa konflik berlatar etnik di Lampung Selatan yang berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2012, menelan korban tewas sebanyak 14 Orang, 13 luka parah dan 1.700 orang mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kemiling, Bandar Lampung. Sedangkan kerugian materiil mencapai Rp. 24.88 miliar, dan sebanyak 532 rumah rusak dibakar (**lihat tabel 1.1**).¹⁸

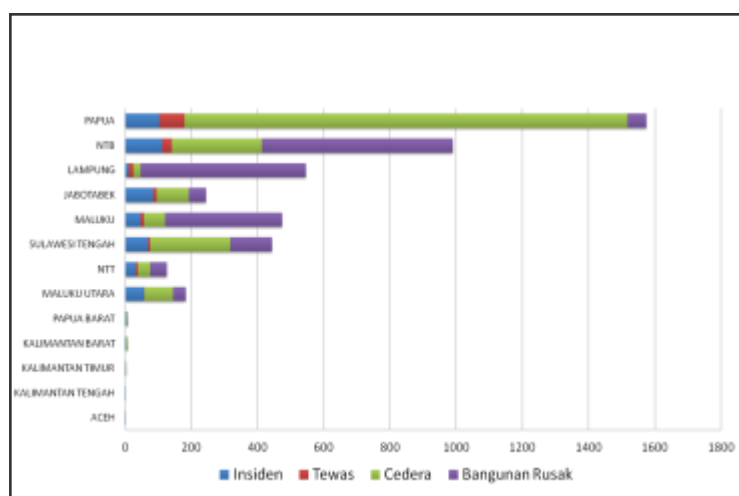
¹⁷ Denny J.A. "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi". Jakarta: Inspira.co, 2014, hlm. 44.

¹⁸ Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012. Dari https://books.google.co.id/books?id=TO4xDwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Dicari+Capres+2014+yang+Melindungi+Keberagaman&source=bl&ots=VZrScty2BJ&sig=UUYIztdwxv1gVYBe_9gEkQ47k74&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj30_6H1dLcAhWLFH0KHUNNB2UQ6AEwBHoECAYQAAQ#v=onepage&q=lampung&f=true; diakses pada 4 Agustus 2018.

Tabel 1.1 Lima Kasus Diskriminasi Besar di Indonesia				
Kasus	Jumlah Korban	Lama Konflik dan Luas Konflik	Kerugian Materi	Frekuensi Berita
Diskriminasi berlatar agama (Maluku dan Maluku Utara)	8000-9000 orang meninggal. 700.000 orang mengungsi	4 tahun (1999-2002). 2011 juga terjadi konflik. Provinsi (Maluku)	29.000 rumah terbakar, 7046 rumah rusak, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah, dan 4 bank hancur	Google search "Kerusuhan Ambon" = 147.000 item
Diskriminasi berlatar etnik (Sampit)	496 orang meninggal, 108.000 orang mengungsi	10 hari (puncak konflik). Sepanjang 2001 terjadi ketegangan. Kota Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur. Meluas ke kota Palangkaraya, Kuala Kapuas, dan Pangkalanbun	192 rumah dibakar, 748 rumah rusak, 16 mobil dan 43 sepeda motor hancur	Google search "Kerusuhan Sampit" = 41.000 item
Diskriminasi berlatar etnik dan gender (Jakarta 13-15 Mei 1998)	1.217 jiwa meninggal, 85 perempuan diperkosa, 70.000 orang mengungsi	3 hari (13-15 Mei 1998). Provinsi (DKI Jakarta)	+/- Rp 2.5 Triliun	Google search "Kerusuhan 13-15 Mei 1998" = 24.700 item
Diskriminasi berlatar perbedaan keyakinan (Transito Ahmadiyah Mataram)	9 orang meninggal, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 orang terusir, 9 pasangan dipaksa cerai, 3 perempuan hamil keguguran, 61 siswa putus sekolah, 45 orang dipersulit KTP, 322 orang dipaksa keluar Ahmadiyah	7 kali penyerangan massif (1998-2006). 8 thn pengungsian (2005-2012). 4 wilayah dalam 1 provinsi (Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram)	11 tempat ibadah dan 144 rumah rusak, 64,17 ha tanah telantar, 25 tempat usaha rusak, harta benda rusak/dijarah	Google search "Penyerangan Ahmadiyah Lombok" = 30.800 item
Diskriminasi berlatar etnik (Lampung Selatan)	14 orang tewas, belasan luka parah, 1700 orang mengungsi	3 hari (27-29 Oktober 2012). Kecamatan (Kalianda dan Way Panji)	Rp. 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar	Google search "Bentrok Lampung Selatan 28 Oktober 2012" = 80.700 item

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.

Kedua, The Habibie Center melalui SNPK (Sistem Nasional Pemantau Kekerasan) merilis data bahwa bahwa jika ditinjau berdasarkan persebaran wilayahnya, kekerasan antar kelompok berbasis identitas dominan terjadi di tiga provinsi, yakni Papua, NTB, dan Lampung. Provinsi Lampung masuk dalam kategori wilayah yang rerata insiden dengan dampak korban tewas tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya (**Lihat Gambar 1.1**).¹⁹



Gambar 1.1 Insiden dan Dampak Kekerasan Antarkelompok di 13 Provinsi Periode 2005-2013

Sumber: Kajian Perdamaian dan Kebijakan, “Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia”, *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret 2014, hlm. 13.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hampir terjadi konflik komunal yang melibatkan pendatang dan penduduk asli di setiap kabupaten di Lampung, seperti kasus Menggala dan Gunung Terang (Tulang Bawang), Fajar Bulan (Lampung Barat), Jabung (Lampung Timur), dan terakhir yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan pada 27-29 Oktober 2012, berupa konflik etnis

¹⁹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 9-10.

Balinuraga yang melibatkan pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung.²⁰

Jika ditilik lebih jauh ke dalam, konflik laten yang muncul menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) dan konflik kekerasan di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, 28-29 Oktober 2012 yang lalu adalah manifestasi dari akumulasi kekesalan dan kekecewaan (frustrasi) atas serangkaian konflik masa lalu yang penyelesaiannya selalu tertunda dan tidak pernah tuntas. Maka, sewaktu-waktu ada pemicu, mereka dapat marah dan melakukan perlawanan (agresi).

Muncul beragam perspektif terkait kronologis sebab munculnya konflik kekerasan di Balinuraga, Lampung Selatan, Oktober 2012. Berdasarkan data SNPK, The Habibie Center, mengutip dari berita “www.tempo.co”, 2 November 2012, bahwa konflik kekerasan yang mampu mengerahkan massa penduduk lokal Lampung dari desa di sekitar Kecamatan Way Panji dan seluruh penjuru Provinsi Lampung, dipicu oleh insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis Lampung, bernama Nurdiyana Dewi (18 tahun), warga Desa Agom Kecamatan Kalianda, dan Emiliya Elisa (17 tahun), warga Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda, pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIB.²¹

Kronologi peristiwa konflik kekerasan di Balinuraga bermula saat kedua gadis Lampung, Diana dan Emi, berboncengan mengendarai sepeda motor usai berbelanja peralatan *make up* pada sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati segerombolan pemuda Balinuraga yang sedang menunggangi sepeda (Data SNPK, mencatat terdapat 10 orang pemuda Balinuraga). Tidak disangka seorang pemuda berusaha memegang paha Emi. Emi, yang posisinya dibonceng oleh Diana, berusaha menepisnya. Namun, karena jumlah pemuda yang lebih banyak, fokus dan

²⁰ Setiawan, Wahyu, *op. cit.*, hlm. 67-79.

²¹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 14.

keseimbangan Diana buyar sehingga sepeda motornya terjatuh.²² Keduanya berusaha ditolong seorang warga Desa Balinuraga, untuk diangkat ke pinggir jalan. Tak lama setelah Diana menghubungi keluarganya, kakaknya datang dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, keduanya diurut dan diobati karena mengalami luka memar di siku dan lutut. Sementara orang tua menunggu anaknya diurut, di luar sudah berkerumun massa yang datang dari desa tetangga bersiap untuk memberi pelajaran pada pemuda Balinuraga yang dianggap sudah keterlaluan dan menghina *pi'il* atau harga diri suku Lampung.²³ Inilah salah satu alasan mengapa konflik menjadi membesar, yaitu dalam tata kehidupan sosialnya, orang Lampung memegang prinsip *Piil Pesengiri* yang menempatkan harga diri dalam posisi tertinggi. Sehingga, ketika mereka merasa harga dirinya telah dicerai oleh kelompok lain, maka akan sangat mungkin terjadi gesekan sosial yang memicu terjadinya konflik terbuka.

Kabar menyebar lebih cepat dari perkiraan, pada hari Minggu, 28 Oktober 2012, ratusan orang berkumpul kembali di perempatan Jalan Way Harong. Kali ini massa berdatangan hingga dari luar Lampung Selatan. Mereka siap melakukan penyerangan dan akhirnya konflikpun tak dapat dihindari, sehingga menjatuhkan tiga korban meninggal. Pada hari ketiga, Senin 29 Oktober 2012, konflik kekerasan dalam skala besar semakin tidak dapat dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI yang berjumlah 2.100 personel, sedangkan jumlah massa mencapai belasan ribu.²⁴ Akhirnya konflik memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian materil yang cukup besar.

Dikutip dari Laporan Penelitian LPM Unkris, Panggabean menandakan bahwa terulangnya konflik Lampung menjadi indikator gagalnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, yang dinilai tidak mampu mencegah terjadinya konflik kekerasan yang

²² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5-10.

melibatkan etnis Bali dan penduduk lokal Lampung. Aparat kemanan gagal dalam mende-eskalasi ketegangan dan mencegah konflik kekerasan karena intervensi dilakukan setelah konflik mulai meluas.²⁵

Pemerintah Daerah dianggap gagal dalam melakukan upaya penanganan konflik sosial di Balinuraga seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, yaitu seyogianya pemerintah harus melakukan: *Pertama*, upaya pencegahan (pasal 1), dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Namun, realisasinya lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) belum dimaksimalkan perannya karena kurangnya sumber daya dan anggaran; *kedua*, penghentian konflik dalam pasal 12; dan *ketiga*, pemulihan pasca konflik yang meliputi tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah dalam hal ini gagal dalam melakukan penghentian terhadap konflik kekerasan yang terjadi karena hanya berorientasi pada upaya penghentian kekerasan, bukan penghilangan akar konflik sehingga konflik dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

Berdasarkan pada fakta yang dipaparkan di atas maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian atas upaya transformasi konflik yang dilakukan di Balinuraga, Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, yaitu: 1) Kerusakan di Balinuraga menimbulkan efek mematikan dan kerugian materil yang cukup besar; 2) konflik identitas yang melibatkan kelompok tidak hanya antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga melibatkan suku lainnya; 3) kompleksitas hubungan antara migran dan penduduk lokal; 4) penyelesaian yang tidak pernah tuntas; dan 5) kompleksnya sumber konflik yang ada.

²⁵ Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam Tesis ini adalah “Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”. Secara lebih spesifik, penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian, antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan
2. Upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik di Balinuraga, Lampung Selatan dapat bereskalasi dari konflik laten menjadi menjadi konflik terbuka?
2. Bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian terhadap konflik kekerasan yang melibatkan pendatang dan penduduk lokal di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan adalah: 1) menganalisis faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan; dan 2) menganalisis upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dan mengembangkan konsep transformasi yang baik guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Lampung Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan berkenaan dengan pengembangan konsep, teori, metode, dan pendekatan dalam kajian Keamanan Nasional, khususnya dalam kajian Studi Damai dan Resolusi Konflik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya transformasi konflik dalam menyelesaikan akar persoalan (*root causes*) melalui pembangunan sinergitas yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh masyarakat, agama dan adat, dengan melibatkan masyarakat (*grassroot*) dalam usaha menghilangkan prasangka-prasangka negatif (*stereotip*), masalah sosio-kultural, meminimalkan tingkat disparitas ekonomi dengan membangun identitas *we-ness* (kekitaan) dan komunikasi baru baik melalui kearifan lokal maupun modal sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi *guideline* bagaimana menciptakan pola hubungan dan komunikasi yang harmonis antar berbagai suku, khususnya Suku Lampung dengan Suku Bali, agar terwujud koeksistensi antar suku dan perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.